



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA DI KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG (UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN)

Eko Priyono

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merubah ketentuan umum perpajakan, Pajak Penghasilan, PPN, Pajak Karbon, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS memberikan kesempatan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Rumusan masalah yaitu mengapa PPS di KPP Pratama Jakarta Pulogadung belum efektif dan bagaimana upaya agar PPS efektif. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Pelaksanaan PPS di KPP Pratama Jakarta Pulogadung belum efektif berdasarkan hasil persandingan data eligible PPS KPP Pratama Jakarta Pulogadung dengan jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela, Surat Kerangan yang terbit, nilai harta bersih, dan PPh yang diterima. Upaya untuk meningkatkan efektivitas Program Pengungkapan Sukarela bisa dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung antara lain dengan melaksanakan kelas pajak PPS melalui zoom cloud meeting, sosialisasi melalui media sosial, dan menyampaikan himbauan/klarifikasi data melalui surat, email, whatsapp blast, atau email kepada Wajib Pajak eligible PPS.

Kata Kunci: PPS, Pengungkapan Harta, Harta Bersih.

PENDAHULUAN

DPR mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Sebagaimana namanya Undang-Undang ini

mengharmonisasikan beberapa materi peraturan perpajakan yang ada, diantaranya Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Program Pengungkapan Sukarela.

Dengan adanya UU ini diharapkan mampu memulihkan ekonomi dengan fokus perbaikan defisit anggaran serta meningkatkan rasio pajak dengan cara menerapkan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Pelaksanaan PPS melihat kondisi yang terjadi di masyarakat masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak dan wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 sampai dengan 2020. Tujuan PPS adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepatuhan hukum, serta kemanfaatan. Periode pelaksanaan PPS mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

Program yang baik membutuhkan pelaksanaan yang baik juga demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Edukasi perpajakan diperlukan supaya informasi tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Adanya pembatasan mobilitas sebagai akibat pandemi Coronavirus disease (COVID-19) membutuhkan metode dan sarana edukasi perpajakan yang sesuai. Perkembangan teknologi bisa membantu pelaksanaan sosialisasi dengan syarat dilakukan secara tepat dan sesuai sasaran. Namun, penerapan edukasi perpajakan masing-masing daerah bisa berbeda-beda sesuai kondisi wajib

pajaknya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan latar belakang kurang efektifnya pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela, menemukan akar masalah, dan menyusun langkah-langkah upaya Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penerimaan pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi model pembangunan sistem kebijakan perpajakan dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang terjadi pada lokasi penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan, sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang beralamat di Jl. Pramuka Kav. 31, RT.11/RW.5, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2022. Bahan dan data yang digunakan merupakan data kumulatif yang diperoleh dan dimanfaatkan dari data primer yang didapatkan observasi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Dengan ditambahkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berasal dan

diperoleh dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan penelitian serta mendukung data yang dikumpulkan guna mendukung penelitian yang dilakukan tentang Efektivitas Program Pengungkapan Sukarela yang Berkeadilan Sosial. Teknik yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ini dengan data kepustakaan dan dokumen dengan didukung data lapangan yang diperoleh melalui wawancara elisitasi dengan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil
Data Wajib Pajak pemacu eligible PPS KPP Pratama Jakarta Pulogadung**

Berdasarkan data yang diturunkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur jumlah data wajib pajak yang memenuhi syarat/eligible berdasarkan data denguji:

Tabel 1 Data eligible PPS KPP Pratama Jakarta Pulogadung

KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	TOTAL DATA		
	JUMLAH WP	JUMLAH DATA	NILAI DATA
EOI Inbound vs Ph Netto Luar Negeri	202	255	28.905.389.009
Kenaikan Harta Bersih vs Penghasilan	806	806	79.196.094.678
Pengalihan Saham cfm AHU vs Penghasilan OP	322	322	71.491.798.697
Total	1.330	1.383	1.479.593.282.384

Edukasi dan pelayanan yang efektif

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan Manual IKU yang ditetapkan adalah 67%.

Jumlah Harta Bersih dan Nilai PPh



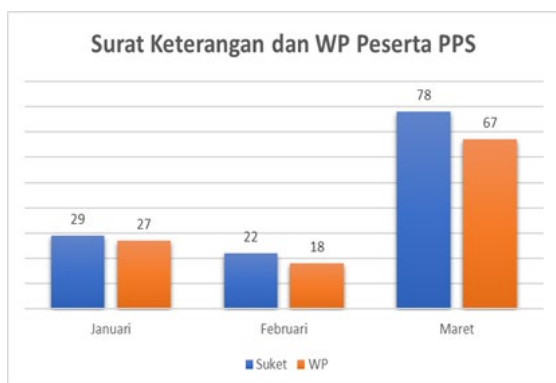
Gambar 1 Nilai harta bersih dan PPh

Berdasarkan data Managerial Dashboard and Online Reporting DJP diperoleh informasi nilai harta bersih dan nilai PPh sebagai berikut:

- a) Januari dengan nilai harta bersih 12,1 M dan PPh 1,6 M;
- b) Februari dengan nilai harta bersih 20,8 M dan PPh 2,0 M; dan
- c) Maret dengan nilai harta bersih dengan 184,0 M dan PPh 17,3 M.

Jumlah Surat Keterangan dan wajib Pajak yang memanfaatkan PPS

Berdasarkan data Managerial Dashboard and Online Reporting DJP diperoleh informasi jumlah Surat Keterangan dan Wajib Pajak yang memanfaatkan PPS adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Surat Keterangan dan Wajib Pajak peserta PPS

Januari dengan jumlah 29 Surat Keterangan dan 27 Wajib Pajak, Februari dengan jumlah 22 Surat Keterangan dan 18 Wajib Pajak; dan Maret dengan jumlah 78 Surat Keterangan dan 67 Wajib Pajak.

Pelaksanaan Kelas Pajak Program Pengungkapan Sukarela KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Pelaksanaan kelas pajak PPS yang sudah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung mulai Januari sampai dengan Maret 2022 melalui zoom cloud meeting adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Kelas Pajak PPS KPP Pratama Jakarta Pulogadung

No	Nama Unit Kerja	Tanggal Penyelenggaraan	Jumlah Pendaftar	Jumlah Peserta	Jumlah WP yang diundang
1	KPP Pratama Jakarta Pulogadung	19 Januari 2022	6	6	250
		26 Januari 2022	20	20	300
		2 Februari 2022	7	7	200
		9 Februari 2022	12	12	250
		16 Februari 2022	10	10	250
		23 Februari 2022	15	15	300
		02 Maret 2022	11	11	250
		09 Maret 2022	2	2	200
		16 Maret 2022	2	2	200
		23 Maret 2022	1	1	150
		30 Maret 2022	1	1	150

Media sosial KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Berdasarkan tangkap layar media sosial KPP Pratama Jakarta Pulogadung adalah sebagai berikut:

- a) Instagram



Gambar 1 Instagram KPP Pratama Jakarta Pulogadung



Gambar 2 Sosialisasi PPS melalui Instagram

b) Facebook



Gambar 3 Facebook KPP Pratama Jakarta Pulogadung

c) Twitter



Gambar 4 Twitter KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Pulogadung

KPP Pratama Pulogadung sudah melakukan upaya-upaya untuk mensukseskan PPS sebagai berikut:

- a) Sosialisasi melalui media sosial yaitu instagram, facebook, dan twitter;
- b) Pemasangan spanduk di KPP Pratama Pulogadung dan

Kelurahan di wilayah kecamatan Pulogadung;

- c) Pelaksanaan Kelas Pajak PPS setiap hari Rabu;
- d) Penyampaian himbuan/krarifikasi data kepada wajib pajak yang memenuhi syarat/eligible PPS.

Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sudah efektif

Data eligible PPS dan Wajib Pajak yang memanfaatkan PPS apabila disandingkan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1 Prosentase Peserta PPS

No	Kategori	Ikut PPS	Data eligible	Prosentase WP PPS
1	Jumlah WP	112	1.330,0	8,42%
2	Nilai Harta	216,9	1.479,6	14,66%

Berdasarkan nilai yang ditetapkan 67% pelaksanaan edukasi perpajakan dianggap efektif maka Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Jakarta Pulogadung belum efektif dari Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan PPS (8,42%) maupun nilai harta (14,66%).

Edukasi Perpajakan PPS sudah tepat sasaran kepada wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Berdasarkan uraian kegiatan kelas pajak yang dilakukan dari data eligible 1330 Wajib Pajak, diundang untuk edukasi perpajakan melalui email, wa blast dan surat hadir 87 Wajib Pajak sehingga prosentase diperoleh 6,54%.

Berdasarkan persandingan data follower media sosial, WP efektif dan WP eligible PPS diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2 Persandingan data Wajib Pajak

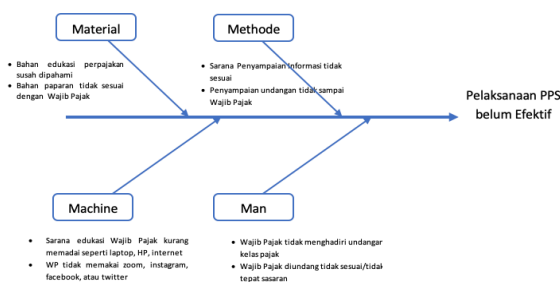
No	Uraian	Follower	WP Efektif	WP eligible
1	Instagram	1.754		
2	Facebook	649		
3	Twitter	248		
	Jumlah	2.651	63.725	1.330

Follower seluruh Instagram, facebook, dan twitter jika dijumlah adalah 2.651, sehingga merupakan 4,16% dari WP efektif. Jika diasumsikan follower merupakan Wajib Pajak berbeda dan melihat informasi yang disampaikan melalui media sosial KPP Pulogadung maka belum seluruh Wajib Pajak memperoleh informasi.

Dengan demikian sarana edukasi perpajakan PPS di KPP Pratama Jakarta Pulogadung belum efektif.

Analisis diagram fishbone

Diagram Cause and Effect atau Diagram Sebab Akibat adalah alat yang membantu mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan berbagai penyebab yang mungkin dari suatu masalah atau karakteristik kualitas tertentu. Diagram ini menggambarkan hubungan antara masalah dengan semua faktor penyebab yang mempengaruhi masalah tersebut. Jenis diagram ini kadang-kadang disebut diagram "Ishikawa" karena ditemukan oleh Kaoru Ishikawa, atau diagram "fishbone" atau "tulang ikan" karena tampak mirip dengan tulang ikan.



Gambar 5 Diagram fishbone

Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama

Jakarta Pulogadung belum efektif dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- Wajib Pajak tidak menghadiri undangan kelas Pajak PPS;
- Wajib Pajak yang diundang tidak sesuai/tepat sasaran;
- Sarana edukasi Wajib Pajak kurang memadai seperti laptop, handphone, dan jaringan internet;
- Wajib Pajak tidak menggunakan zoom cloud meeting, instagram, facebook, atau twitter;
- Sarana penyampaian undangan PPS tidak sesuai sehingga tidak tersampaikan kepada Wajib Pajak;
- Bahan edukasi PPS kurang sesuai sehingga kurang dipahami Wajib Pajak.

SIMPULAN

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas PPS yang telah berlangsung di KPP Pratama Jakarta Pulogadung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2022 belum efektif. Diketahui dari persandingan data eligible PPS KPP Pratama Jakarta Pulogadung dengan jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela, Surat Kerangan yang terbit, nilai harta bersih, dan PPh yang diterima. Penyebab belum efektifnya PPS di KPP Pratama Pulogadung adalah informasi belum tersampaikan kepada Wajib Pajak yang tepat dikarenakan sarana yang digunakan belum sesuai.

Beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas Program Pengungkapan Sukarela bisa dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung antara lain dengan melaksanakan kelas pajak PPS melalui zoom cloud meeting, sosialisasi melalui media sosial, dan menyampaikan himbauan/klarifikasi data melalui surat, email, whatsapp blast, atau email kepada Wajib Pajak eligible PPS.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.

M. Echols, John dan Hasan Syadily. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Tentang Kemanfaatan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Neuman, W.L. 1991. *Social Research Methods*. London: Allyn dan Bacon.

Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Ctk. Kedelapan Citra Aditya Bakti.

Singarimbun, Masri & Effendi, Sofyan. 1997. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Pres.

Suharto. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT Indah

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>, 17 Maret 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 29 Maret 2022